

TAJUK RENCANA

Berantas Judi Online, Tangkap Bandar

PRESIDEN Jokowi telah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Daring (judi online) yang diketuai langsung Menkopolkam Hadi Tjahjanto. Sejauh mana efektivitas jera Satgas Judi Online, akan terlihat pada pekan-pekan mendatang. Namun, setidaknya dalam pekan ini Satgas mulai bekerja dalam memberantas judi online.

Sebagaimana disampaikan Menkopolkam Hadi Tjahjanto, Satgas Pemberantasan Judi Online akan memfokuskan pada tiga hal. Pertama, pembekuan rekening, kedua, penindakan jual-beli rekening dan ketiga penindakan terhadap transaksi game online melalui top up di minimarket.

Masyarakat tentu berharap komitmen pemerintah untuk memberantas judi online bukan sekadar formalitas belaka. Masyarakat ingin bukti nyata bahwa judi online benar-benar diberantas, karena telah meracuni masyarakat di semua kalangan, tak hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak. Bahkan judi online telah merajalela di semua kalangan, baik eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif. Tak luput pula kalangan wartawan yang terdeteksi PPAK ikut terlibat judi online.

Di sisi lain, aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian juga terus mengusut dan membongkar kasus perjudian online di semua wilayah Tanah Air. Mereka yang kedapatan terlibat judi online diproses hukum hingga pengadilan. Sayangnya, harus diakui, sejauh ini mereka yang ditangkap atau diungkap barulah pemain kecil, belum menyentuh bandar besar. Karenanya, ada sebagian elite yang mera-

gukan bahwa Satgas Pemberantasan Judi Online akan menasar ke semua level, mulai dari yang kecil hingga besar. Kita terperangah dengan pernyataan Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam tayangan di sebuah media bahwa di Indonesia ada lima bandar yang bermain. Menurut itu urusan penegak hukum, bukan Kominfo. Pernyataan ini bak bola panas yang harus direpson dengan cepat oleh aparat penegak hukum, khususnya Satgas Pemberantasan Judi Online agar tidak menjadi bola liar. Sayangnya, Budi Arie tidak menyebut siapa lima orang tersebut.

Hemat kita, pernyataan seorang menteri tentu harus dapat dipertanggungjawabkan. Kita mendorong dibuka saja ke publik siapa saja lima orang yang dimaksud, kemudian ditindakanjudi Satgas Pemberantasan Judi Online. Jangan sampai isu itu menjadi bola liar dan mengarah fitnah. Kita yakin aparat penegak hukum, khususnya yang tergabung dalam Satgas Pemberantasan Judi Online, dapat segera merespons pernyataan Budi Arie untuk kemudian mengumpulkan bukti guna memproses hukum bandar.

Kita juga mengingatkan Satgas untuk tidak tebang pilih dalam memberantas judi online. Kiranya tak sulit bagi Satgas untuk mendapatkan dua alat bukti yang sah guna memproses hukum mereka. Kini tinggal bagaimana political will aparat penegak hukum untuk sungguh-sungguh memberantas penyakit masyarakat ini. Jangan hanya mengejar pemainnya saja, tapi lebih penting tangkap dan proses hukum bandarnya. □-d

Membangun Ilmu Sosial Asia Tenggara

Ahmad-Norma Permata

ASIA Tenggara merupakan kawasan yang mencakup sepuluh negara, dan biasanya dikelompokkan ke dalam dua bagian: Asia Tenggara daratan, yang meliputi negara Myanmar, Vietnam, Laos Cambodia, dan Thailand; dan Asia Tenggara kepulauan yang meliputi Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei, Indonesia, serta anggota baru Timor Leste.

Nama Asia Tenggara (*Southeast Asia*) merupakan istilah baru yang pertama kali digunakan oleh Komandan Tinggi Sekutu pada PD II, Lord Mountbatten (1900-1979), sekadar untuk menandai kawasan yang ada di antara wilayah Asia Selatan dan Asia Timur. Karena itu, ada pendapat yang menganggap bahwa Asia Tenggara adalah sebuah fiksi geografis (*geographical fiction*), yang tidak nyata.

Pandangan seperti ini secara tidak disadari cukup meluas. Yaitu anggapan bahwa Asia Tenggara tidak memiliki entitas mandiri, dan hanya merupakan pinggir peradaban-peradaban dunia: India, Cina, Islam, dan Barat. Celakanya, warga Asia Tenggara sendiri banyak yang melihat dan menempatkan diri sekadar sebagai pengikut dari komunitas yang dianggap sebagai pusat peradabannya.

Padahal kajian arkeologis dan antropologis terkini menunjukkan bahwa bangsa-bangsa Asia Tenggara sudah memiliki peradaban yang maju, baik pertanian dan pengairan, metalurgi, maupun teknologi kelautan. Nenek moyang kita bahkan sudah mengarungi lautan hingga Afrika, New Zealand, hingga Hawaii, jauh sebelum pengaruh India masuk.

Persepsi yang salah terhadap Asia Tenggara ditambah dengan sikap rendah diri warganya-termasuk para sarjananya-menjadikan kajian terhadap fenomena Asia Tenggara cenderung evaluatif dan tidak konstruktif. Apa yang terjadi di kawasan Asia Tenggara lebih sering dilihat sebagai penyimpangan yang buruk dari praktik normatif yang ada di pusat-pusat peradaban nun di sana.

Ada dua contoh relevan yang dapat disebutkan. Pertama, terkait tradisi keagamaan dalam Islam. Banyak pandangan bahwa Islam Indonesia masih tidak sesuai dengan Islam yang berkembang di Asia Barat (orang Eropa menyebutnya Timur Tengah, karena terletak di antara kawasan Timur dekat, yaitu Turki dan Timur Jauh yaitu Cina dan sekitarnya), sehingga harus dilakukan



KR-JOKO SANTOSO

yang oleh antropolog Amerika Robert Hefner disebut *Civil Islam* (Islam berkeadaban): menjadi fondasi kehidupan kebangsaan yang demokratis, yang tidak ditemukan di kawasan Muslim di Asia Barat.

Lebih seru lagi, menurut sarjana Turki Ahmet Kuru, dunia Islam saat ini sedang didera tiga penyakit akut: yaitu kekerasan, otoritarianisme, dan keterbelakangan. Menurut Kuru, obat dari ketiga penyakit tersebut ada di Indonesia. Karena Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia, sekaligus negara Muslim yang damai, demokratis dan relatif maju.

Sementara dalam kaitan dengan demokrasi, sebenarnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara sudah memiliki sejumlah eksperimen tata negara dan tata kekuasaan yang sesuai dengan konteks kehidupan lokal: seperti demokrasi pancasila di Indonesia, atau demokrasi pragmatis di Singapura. Namun justru karena penghakiman yang selalu dilakukan oleh para sarjana-

asing maupun lokal-dengan menggunakan standar demokrasi Barat, maka eksperimen tersebut tidak berkelanjutan.

Padahal upaya meniru demokrasi model Barat-seperti demokrasi prosedural dan nalar kekuasaan mayoritas-telah terbukti menjadikan sistem demokrasi Indonesia menjadi sistem politik yang mahal dengan segala sisi gelap yang merugikan, seperti korupsi, politik dinasti, dll.

Perlu mulai dibangun kesadaran epistemologis yang lebih mandiri dan percaya diri akan potensi Asia Tenggara sebagai sistem kehidupan yang penuh nilai positif. Mantan diplomat sekaligus pemikir politik Singapura Kishore Mahbubani pernah menulis buku tentang ASEAN (Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara) menyatakan, ASEAN adalah keajaiban (*miracle*) dunia modern.

Di tengah situasi geopolitik yang kian penuh konflik, Asia Tenggara satu-satunya kawasan yang bisa berhubungan baik dan bekerjasama dengan semua kelompok ideologi dan kekuatan politik di dunia. Mahbubani bahkan mengatakan, Abad 21 adalah Abad Asia, namun ibukotanya bukan di Beijing, Tokyo, atau Seul melainkan Singapura. Asia Tenggara akan menjadi pusat dunia, dan para warganya perlu membangun sikap dan pola pikir yang produktif dan elegan.

Terkait ini, UIN Suka Yogyakarta telah membuka program Magister Sosiologi (S2) dengan fokus kajian Asia Tenggara. Program ini didesain untuk mencetak calon-calon akademisi, analis sosial, serta pekerja sosial yang mumpuni dengan wawasan Asia Tenggara. Diharapkan alumni program ini memiliki wawasan dan jaringan regional dan internasional untuk ikut membangun tradisi teori dan praktik ilmu sosial di Asia Tenggara. □-d

*) **Ahmad-Norma Permata**, Dosen Fakultas Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 550 - 600 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPENS/USUPPA/7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisijanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH.

Direktur Umum: Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. General Manager : H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs H Octo Lampito MPD. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro SPD, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wahid. Redaktur: Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSL, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Efiy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis : Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Langanan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklankr@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk "Kedaulatan Rakyat Minggu"... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluaran...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPD, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkap kartu pers/surat tugas.

Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Muhammadiyah

Dwi Kuswantoro

MENARIK episode akhir hubungan Muhammadiyah dengan Bank Syariah Indonesia (BSI). Kalau kita cermati jauh sebelum kejadian terakhir, hubungan Muhammadiyah dengan BSI sejak awal persiapan merger antara Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah yang kemudian menjadi BSI memang sudah naik turun. Bahkan Muhammadiyah sudah memberi kritikan sangat keras sejak awal berdirinya BSI sebagai bank syariah terbesar hasil merger supaya tidak meninggalkan khittah sebagai bank syariah yang peduli dengan ekonomi umat dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Puncaknya setelah keluarnya edaran resmi untuk semua Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di tingkat pusat sampai dengan ranting tahun ini untuk memindahkan dananya dari BSI ke bank syariah lainnya. Perkiraan angka mencapai Rp 15 triliun. Kalau ini terjadi dalam waktu bersamaan bisa dipastikan mengganggu stabilitas bisnis BSI, apalagi kalau kemudian diikuti oleh anggota dan simpatisan Muhammadiyah.

Muhammadiyah yang telah melewati usia 100 tahun, tentu sudah sangat dewasa menyikapi dinamika sosial, politik dan juga ekonomi bangsa. Artinya, Muhammadiyah jelajah penginderannya sudah sangat jauh melebihi rata-rata organisasi kemasyarakatan yang ada. Selain memang karena Muhammadiyah sudah terbiasa berdikari, ada ataupun tidak bantuan dari negara; terlebih hanya soal jabatan publik. Dalam organisasi Muhammadiyah persoalan kepemimpinan atau jabatan dalam organisasi sudah terbangun *culture* bahwa jabatan adalah amanah, bukan sebagai berkah.

Ekosistem Bisnis

Trend baru konsep bisnis era 4.0 saat ini menempatkan kegiatan bisnis baik sektor riil (ekonomi) dan keuangan dalam satu konsep ekosistem. Konsep ini diadopsi dalam konsepsi ekosistem kehidupan yang ada di alam. Gampangnya, kalau konsep klasik untuk bisa mendengarkan kicauan burung adalah dengan membeli burung, sangkar dan perlengkapan pendukungnya. Konsekuensinya setiap hari harus mengurus burung tersebut dari memberi makan pagi, siang dan sore, memandikan dan lain-lain. Untuk mendapatkan hasil kicauan yang diharapkan memerlukan *effort* yang tidak sedikit.

Konsep ekosistem bisnis untuk mendapatkan suara kicauan burung setiap hari kita tidak perlu membeli burung dengan perangkat pendukungnya, cukup membu-

at ekosistem yang disukai burung. Apa itu? tanaman yang menghasilkan buah-buahan sumber makanan burung. Maka dengan sendirinya burung akan datang dan setiap hari kita akan dapat mendengarkan suara merdu mereka bernyanyi. Kita tidak perlu repot-repot mengurus burung-burung tersebut. Kita hanya perlu merawat supaya tanaman dan pendukung ekosistem tetap terjaga dan lestari, sehingga burung-burung betah dan nyaman di ekosistem yang terbentuk.

Sistem Ekonomi Berdikari

Muhammadiyah saat ini telah memiliki semua infrastruktur ekonomi dan keuangan yang sangat memadai. Kegiatan ekonomi dan keuangan sudah bertumbuh dari tingkat ranting sampai dengan tingkat pusat. Belum lagi kegiatan yang ada di amal usaha seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Pertanyaannya apakah perlu Muhammadiyah mendirikan bank syariah sendiri pasca perpisahan dengan BSI?

Menurut pandangan kami, Muhammadiyah tidak harus emosional kemudian mendirikan bank syariah sendiri, karena perbankan proses bisnisnya tidak sesimpel yang dibayangkan dan Muhammadiyah pernah berpengalaman tentang hal ini. Yang diperlukan saat bagi bukan institusi dalam bentuk bank, tetapi sistem perbankan. Coba kita lihat beberapa platform bisnis digital yang bertumbuh saat ini, bukankah mereka mampu menghadirkan sistem perbankan dengan tanpa mendirikan bank.

Saatnya Muhammadiyah membuat *roadmap* jangka panjang untuk terbentuknya ekosistem ekonomi dan keuangan yang kuat bisa menjadi ruang tumbuh bagi kegiatan ekonomi dan keuangan baik bagi kader, simpatisan dan amal usahanya. Ketika ekosistem ekonomi dan keuangan Muhammadiyah kuat, ruangnya terbuka untuk Muhammadiyah bisa menghadirkan konsep-konsep ekonomi dan keuangan yang *out of the box*, seperti halnya yang telah dilakukan Grameen Bank di Bangladesh yang akhirnya menjadi *row model* bank yang *compatible* bagi orang miskin karena aspek prudential bank yang rumit termasuk persoalan jaminan (*collateral*) diberi solusi dengan model kelompok tanggung renteng.

Muhammadiyah sangat mungkin melahirkan gagasan besar seperti Bank Sosial atau Bank Wakaf yang tidak berkonsep bisnis biasa perbankan (*business as usual*). Bahkan sampai dengan sistem pemasaran produk UMKM sangat mungkin dikembangkan oleh Muhammadiyah seperti model pasar komunitas, warung atau toko berjejaring Muhammadiyah (TokoMU) yang bisa melawan hegemoni pasar modern dan platform pasar digital (*market place*). Dengan demikian peran-peran pembelaan dalam ekonomi dan keuangan bagi kaum dhuafa dan *mustadza'fin* akan mampu dihadirkan oleh Muhammadiyah lebih progresif sebagai impenementasi teologi Al-Ma'ain.

Saatnya perpisahan dengan BSI jadi pintu masuk Muhammadiyah memerlukan dakwah ekonomi sesuai amanah Mukhtar ke-48 di Makasar (2015). Pendekatan ekosistem ekonomi dan keuangan bisa menjadi jalan baru bagi hadirnya ekonomi berdikari ala Muhammadiyah yang tidak terikat dan tergantung dengan oligarki bisnis manapun. Dan pada saatnya Muhammadiyah akan bisa menjadi rakasa bisnis baru yang memiliki spirit kenabian, seperti yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, di mana bisnis (ekonomi dan keuangan) menjadi bagian dalam rangka menjaga agama (*hifdzu ad-din*). □-d

*) **Dwi Kuswantoro SE MEK**, Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Nitikan Umluharjo Yogyakarta.

Pojok KR

Dianggap tak mampu tangani pere-tasan, Budi Arie dituntut mundur.
-- Bukan budaya Indonesia, adanya maju tak gentar !

SYL dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.
-- Itu baru tuntutan, vonis bisa tu-run.

Pemda DIY kekurangan pegawai berstatus ASN.
-- Saat seleksi, tak gampang bisa lolos ASN.

Berabs